

PROFIL PENDUDUK MISKIN DI DESA – DESA PESISIR NUSA PENIDA, KABUPATEN KLUNGKUNG

Ida Bagus Purbadharmaja¹

Made Sukarsa²

Ida Gusti Bagus Indrajaya³

Wayan Yogiswara⁴

Putu Desy Apriliani⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

E-mail : purbadharmaja_09@yahoo.com.

Abstract: Profile of the Poor in the Nusa Penida Coastal Villages, Klungkung Regency. Klungkung district has the highest percentage of poor people after Jembrana Regency in Bali Nusa Penida (Part of Klungkung Regency) is contributing almost half of the poor (48.8 %). Nusa Penida as coastal regions (Coastal Zone) is an area that has the characteristics as well as unique and complex problems. Therefore, this study aims to obtain a picture of the poverty profile of the coastal villages of the Nusa Penida, views of economic and non-economic aspects that will be composed primarily of regional development policies in the poverty reduction efforts.

This study uses data collection methods, namely the method of literature or recording documents, interviews, and observation. Analysis method used is descriptive, meaning that explains the figures contained in a table, and then do the interpretation related to the discussion in this study. Descriptive analysis is also supported by the results of interviews and observations made in this study.

Keywords: poverty, economic aspects, and the non-economic aspects

Abstrak: Profil Penduduk Miskin Di Desa – Desa Pesisir Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk miskin tertinggi setelah Kabupaten Jembrana di Propinsi Bali. Kecamatan Nusa Penida merupakan penyumbang hampir sebagian penduduk miskin (48,8%) di Kabupaten Klungkung. Kecamatan Nusa Penida sebagai wilayah pesisir (*Coastal Zone*) merupakan kawasan yang mempunyai karakteristik serta problema yang unik dan kompleks. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran profil kemiskinan desa-desa pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dilihat dari aspek ekonomi dan nonekonomi sehingga nantinya dapat disusun kebijakan pembangunan daerah terutama di dalam upaya penurunan angka kemiskinan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu Metode kepustakaan atau pencatatan dokumen, metode wawancara, dan observasi. Metode analisa yang dipergunakan adalah deskriptif, artinya menjelaskan angka-angka yang terdapat pada suatu tabel, untuk kemudian dilakukan interpretasi terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisa deskriptif didukung pula oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: kemiskinan, aspek ekonomi, dan aspek non ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia pernah mengalami masa keemasan dalam menekan jumlah penduduk miskin, yaitu periode puncak pertumbuhan ekonomi 1976 – 1996. Perekonomian mencatat pertumbuhan rata-rata sekitar 7,5 persen. Meskipun pemberantasan kemiskinan secara eksplisit belum masuk agenda prioritas pembangunan hingga awal 1990-an, pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat itu dinilai sangat *pro-poor*. Ditopang oleh penerimaan devisa dari minyak, pemerintah Orde Baru mengkombinasikan target pertumbuhan ekonomi tinggi dengan berbagai program anti kemiskinan. Artinya menyerang

kemiskinan dari dua arah, hasilnya selama kurun itu angka kemiskinan berhasil diturunkan lebih dari separuhnya dari 40,1 persen pada tahun 1976 menjadi 11,3 persen pada tahun 1996 (Zadjuli : 1995).

Kemiskinan diasosiasikan sebagai penyakit sosial yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunan nasionalnya. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan merupakan konsep dimensi tentang kesejahteraan manusia dengan ciri pokok mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita

karena rendahnya produktivitas. Tingkat produktivitas mereka rendah karena tidak memiliki aset produksi, lemah secara jasmaniah dan rohaniyah sehingga tidak mampu berproduktivitas tinggi.

Tolok ukur lain mengenai kesejahteraan termasuk kemiskinan penduduk sebuah negara yang bukan ditinjau berdasarkan aspek pendapatan, sangat bervariasi. Ada pula yang pendekatannya bukan ekonomi, yakni pendekatan sosial. Semua tolak ukur yang ada, baik pendekatan

ekonomi maupun pendekatan bukan ekonomi haruslah dilihat serta digunakan secara komplementer, dan bukannya secara alternatif atau substitutif.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga masih terbelenggu dari masalah kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2008 – 2010.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2010

No.	Kabupaten Kota	2008		2009		2010	
		Jumlah orang	%	Jumlah orang	%	Jumlah orang	%
1.	Jembrana	20.400	8,0	17.600	6,8	21.200	8,1
2.	Tabanan	28.500	6,9	20.800	4,9	29.300	6,9
3.	Badung	13.700	3,3	14.000	3,3	17.700	3,2
4.	Gianyar	28.900	6,6	25.500	5,8	31.500	8,7
5.	Klungkung	11.700	7,0	8.800	5,2	12.900	7,6
6.	Bangli	13.300	6,1	11.400	5,2	13.800	6,4
7.	Karangasem	29.500	7,7	24.700	6,4	31.600	7,9
8.	Buleleng	46.600	7,5	37.700	5,9	45.900	7,4
9.	Denpasar	13.100	2,2	13.300	2,2	17.500	2,2
	Bali	205.70	5,9	173.800	4,9	221.400	6,3

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2011, diolah

Berdasarkan Tabel 1 perkembangan persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2008 – 2010 relatif konstan, yaitu berada pada kisaran 2,2 – 8,1 persen. Pada periode tersebut persentase penduduk miskin di Kabupaten Jembrana menduduki peringkat teratas, yaitu 8 persen (2008), turun menjadi 6,8 persen (2009), dan kembali meningkat menjadi 8,1 persen (2010) jauh melampaui persentase penduduk miskin Bali. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah ada di Kota Denpasar jauh berada di bawah persentase penduduk miskin Bali.

Kabupaten Klungkung sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Bali memiliki persentase penduduk miskin tertinggi setelah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem. Bila dilihat sebaran penduduk miskin per kecamatan, Kecamatan Dawan merupakan kecamatan dengan persentase penduduk miskin terkecil di Kabupaten Klungkung yaitu 11,38 persen kemudian diikuti oleh Kecamatan Banjarangkan dengan posisi penduduk miskin terkecil kedua yaitu

11,98 persen. Kecamatan Klungkung sebagai pusat ibukota Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk miskin lebih banyak dibandingkan Kecamatan Dawan dan Banjarangkan yaitu sebesar 13,14 persen. Namun demikian persentase penduduk miskin tertinggi adalah di Kecamatan Nusa Penida terdapat 3.034 orang penduduk miskin. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nusa Penida merupakan penyumbang hampir sebagian penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Kecamatan Nusa Penida yang identik dengan kegersangan dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam dan berbatu-batu, curah hujan rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisahkan oleh perairan/laut yang memberikan keterbatasan aksesibilitas dan keterisolasian dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Berikut data sebaran jumlah penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Klungkung.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011

No.	Nama Kecamatan	Penduduk Miskin	
		Jumlah orang	%
1.	Klungkung	1.422	22.9
2.	Banjarangkan	935	15.0
3.	Dawan	824	13.3
4.	Nusa Penida	3.034	48.8
Total		6.215	100.0

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun 2011, diolah

Kecamatan Nusa Penida sebagai wilayah pesisir (*Coastal Zone*) merupakan kawasan yang mempunyai karakteristik serta problema yang unik dan kompleks. Kecamatan Nusa Penida dengan panjang garis pantai 104 Km berpasir putih, laut sekitarnya yang sangat jernih dengan berbagai jenis ikan warna-warni serta terumbu karang yang indah. Secara umum kondisi topografi Nusa Penida tergolong landai sampai berbukit. Desa-desa pesisir sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0-3 persen dari ketinggian lahan 0-268 m.dpl. Semakin keselatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Mata pencaharian utama penduduk adalah pada sector pertanian, perkebunan, peternakan (dengan produk unggulan sapi Bali) dan perikanan (dengan produk unggulan budi daya rumput laut). Kehidupan sehari-hari masyarakat masih kental diwarnai dengan adat dan tradisi lokal. Dengan memahami karakteristik wilayah pesisir yang sarat dan rentan dengan problema yang unik serta kompleks, maka strategi pengembangan kawasan pesisir Nusa Penida harus mengikuti model perencanaan pengembangan kawasan terkini yang selalu berorientasi pada perencanaan berbasis masyarakat.

Kemiskinan memiliki banyak wajah, yang berbeda antar daerah dan waktu. Hal ini berarti masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Menurut Todaro (2000) kemiskinan tidak hanya berbicara masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut hilangnya tiga hal utama, (1) kehidupan, lebih dari 30 persen penduduk negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun, (2) pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf dengan penekanan pada hilangnya hak

pendidikan kaum perempuan, dan (3) keseluruhan ketetapan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan.

Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah sudah melakukan upaya berbagai cara untuk mengurangnya. Adapun upaya-upaya tersebut misalnya, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Subsidi Langsung Tunai (BLT), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM – P2KP), dan program-program lainnya yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan.

Pada dasarnya program-program penanggulangan kemiskinan tersebut cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, seperti program berupa beras untuk orang miskin (raskin). Upaya ini sulit menyelesaikan akar persoalan kemiskinan, karena sifat bantuan adalah tidak menyentuh masalah pemberdayaan, bahkan menimbulkan masalah ketergantungan. Program-program penanggulangan kemiskinan justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Lebih lanjut dikatakan bahwa program-program tersebut cenderung menimbulkan masalah baru, yaitu budaya korupsi dalam penyalurannya. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana profil kemiskinan di desa-desa pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dilihat dari aspek ekonomi dan aspek nonekonomi?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kemiskinan

Menurut Tadaro (2000) kemiskinan adalah rendahnya pendapatan per kapita dan lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan. Salah satu generalisasi yang terbilang paling sahih atau valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Para ahli ekonomi pembangunan mulai mengukur luasnya atau kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu Negara dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan atau

menciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang lain juga menyangkut keterbelakangan manusia dalam pengembangan sumber daya alam. Pengembangan sumber daya alam di suatu daerah tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, maka kemampuan teknik, pengetahuan dan efektifitas kewirausahaan rendah, sehingga sumber daya alam akan terbengkalai, kurang dan bahkan disalahgunakan. Di pihak lain, keterbelakangan sumber daya alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia, karenanya kemiskinan merupakan sebab dan sekaligus akibat keterbelakangan manusia.

Badan Pusat Statistik (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pada dasarnya kemiskinan didefinisikan menurut dua pendekatan, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolute diukur dengan suatu standar tertentu yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Sementara kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang tergantung pada situasi tertentu, yang biasanya membandingkan keadaan sekelompok orang dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Greetz (1974) dalam Tadjuddin (1995) menyatakan bahwa kemiskinan pedesaan Jawa muncul sebagai akibat dari adanya pertanian. Greetz berpendapat bahwa struktur pemilikan tanah yang timpang berarti mencerminkan ketidaksamaan penghasilan masyarakat pedesaan. Dia berpendapat bahwa adanya mekanisme pembagian penghasilan dengan melanggar derajat homogenitas sosial ekonomi.

Menurut Zadjuli (1999) makin ramainya pembahasan masalah kemiskinan dewasa ini, maka perlu diberikan berbagai analisis tentang jenis dan faktor penyebab kemiskinan di dunia termasuk di Indonesia sebagai berikut: (1) Kemiskinan karena kolonialisme, Masyarakat miskin akibat penjajahan yang terus menerus di suatu bangsa dalam kurun waktu yang lama. Seperti Nepal, Banglades, India

dan Pakistan, yaitu bekas jajahan Inggris. Bekas jajahan Belanda seperti Suriname dan Indonesia, bekas jajahan Spanyol seperti Filipina, bekas jajahan Kolonial Portugal seperti Timor Timur, orang India hampir punah karena kolonial Australia dan Selandia Baru, bekas jajahan Prancis antara lain Kamboja dan Vietnam juga tetap miskin hingga sekarang. (2) Kemiskinan karena tradisi sosial cultural, Seperti halnya suku Bali di Cibeo, Banten Selatan, suku-suku bangsa Iran, suku dayak di pedalaman Kalimantan, suku Kubu di Sumatera. (3) Kemiskinan karena isolasi, Kemiskinan karena lokasi tempat tinggal terisolasi, misalnya orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Tengger di Jawa Timur. (4), Kemiskinan structural, Kemiskinan struktural terdiri dari struktur kekuasaan ekonomi dan persaingan yang berat setelah menjadikan Negara Utara dan Negara Selatan Katulistiwa kebanyakan miskin. Struktur ketimpangan hubungan sosial ekonomi antara pusat kegiatan dan daerah belakang ini menjadikan daerah perkotaan menjadi lebih makmur dibandingkan daerah pedesaan.

Ukuran Kemiskinan

Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak diperlukan tolok ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. Adapun ukuran kemiskinan yang digunakan sebagai berikut: (1) Kemiskinan absolute, Kemiskinan absolut lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Konsep kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan individu atau rumah tangga di bawah "garis kemiskinan" atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Golongan paling miskin pendapatannya 240 kg atau kurang beras perkapita pertahun. Golongan miskin sekali pendapatannya 240 hingga 360 kg beras perkapita pertahun. Golongan miskin pendapatannya lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg perkapita pertahun. Menurut konsep ini kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan dimana individu dan rumah tangga tidak mampu mencapai kebutuhan fisik pada tingkat minimal dari standar kebutuhan yang sudah ditetapkan. (2) Kemiskinan relatif, Konsep kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ada kaitannya dengan kebutuhan seseorang dalam masyarakat. Tolok ukur

dari kemiskinan ini adalah tingkat pendapatan keluarga per tahun atau per bulan. Berdasarkan tolok ukur ini seseorang yang tergolong miskin ditentukan berdasarkan kedudukan relatifnya dalam masyarakat. Menurut Kincaid (Arsyad, 2004) semakin besar ketimpangan antara penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan selalu miskin. Pada kondisi lain, bila tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya. Dalam pengertian masih berada dalam keadaan miskin bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya maka konsep ini juga disebut kemiskinan relatif. (3) Kemiskinan social, Selain kemiskinan yang didasarkan pada ukuran pendapatan, kemiskinan juga dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses kepada pelayanan yaitu: (a) Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah miskin atau terpencil. (b) Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan produksi. (c) Rendahnya akses masyarakat miskin kepada layanan air minum. (d) Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha.

Indikator Kemiskinan

Menurut Prihatini (2006), indikator masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan dan ekonomi (konsumsi per kapita). Untuk menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak maka diperlukan tolok ukur yang jelas. Berbagai pendekatan atau konsep digunakan sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. Menurut Bappenas (2006), indikator utama kemiskinan adalah: (1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. (3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. (4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. (5) Lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah. (6) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. (7) Terbatasnya akses terhadap air bersih. (8) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. (9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses

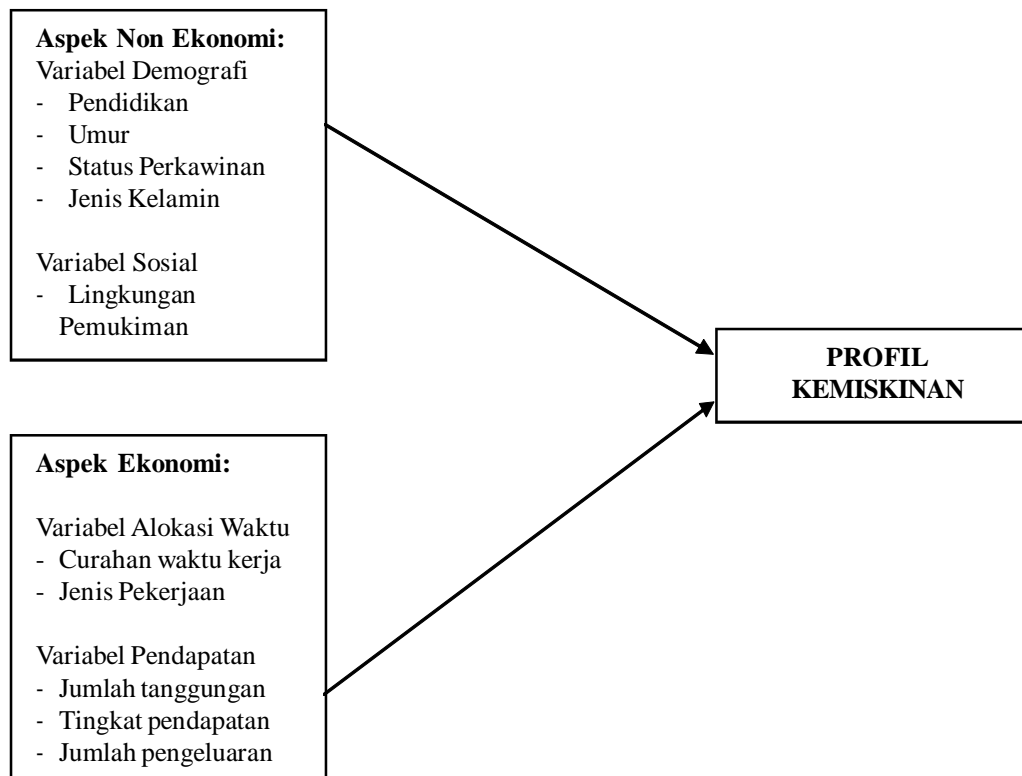
masyarakat terhadap sumber daya alam. (10) Lemahnya jaminan rasa aman. (11) Lemahnya partisipasi. (12) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. (13) Tata kelola pemerintahan yang buruk menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Menurut BPS (2005) kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga dikategorikan miskin apabila: (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang. (2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. (3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. (6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. (7) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. (8) Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu. (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. (10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali sehari, (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas atau poliklinik. (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah atau tidak taman SD atau hanya SD. (14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal, motor atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 dari 14 variabel terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kemiskinan di desa-desa pesisir Nusa Penida. Dimana gambaran kemiskinan ini melihat pada dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Pada aspek ekonomi, penelitian ini menggunakan indikator alokasi waktu baik itu dilihat dari curahan waktu kerja maupun tingkat pendapatan. Pada aspek non ekonomi, penelitian ini menggunakan indikator demografi masyarakat seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan

tingkat pekerjaan. Aspek non ekonomi juga akan melihat kondisi kehidupan sosial penduduk dengan melihat lingkungan pemukiman dimana penduduk tersebut

bermukim. Adapun desain penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Desain Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa-desa pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Hal ini mengingat Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Bali, dimana Kecamatan Nusa Penida memiliki sebaran jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Klungkung. Adapun desa-desa yang terletak di sepanjang pesisir Pantai Nusa Penida seperti Desa Suana, Batununggul, Kutampi, Ped, dan Sakti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang masalah kemiskinan yang terjadi, sehingga dengan demikian akan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai profil kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan dimasa mendatang.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai profil kemiskinan di desa - desa pesisir yang terletak di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dalam penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya pembangunan dalam bidang

ekonomi, namun juga pembangunan dari aspek non ekonomi sehingga diharapkan terjadinya pertumbuhan yang menyeluruh pada setiap sendi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu model yang dapat dipergunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masa mendatang.

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi aspek ekonomi yaitu alokasi waktu kerja dan tingkat pendapatan dan aspek non ekonomi yaitu kondisi demografi dan sosial penduduk miskin di desa – desa pesisir Kecamatan Nusa Penida. Masing-masing variabel tersebut akan diinterpretasikan dengan menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini.

Masing masing variabel dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai berikut: (1) Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini diartikan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di desa-desa pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Data kemiskinan yang

digunakan adalah distribusi jumlah penduduk miskin dimana menggunakan satuan persen. (2) Aspek Ekonomi, merupakan suatu gambaran mengenai aktivitas yang terkait dengan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi penduduk desa-desa pesisir di Kecamatan Nusa Penida yang dilihat dari ragam pekerjaan, tingkat pendapatan, dan konsumsi. (3) Aspek Non Ekonomi, mencakup (a) Sosial, merupakan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang terkait dengan norma, adat istiadat, dan budaya dimana membentuk sebuah sistem sosial mencakup nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku penduduk desa-desa pesisir di Kecamatan Nusa Penida. (b) Demografi, merupakan gambaran mengenai struktur kependudukan dalam hal ini penduduk desa-desa pesisir di Kecamatan Nusa Penida ditinjau dari kondisi demografi yaitu usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat pendidikan. (c) Profil kemiskinan adalah suatu gambaran yang berisikan ciri-ciri tertentu sehingga rumah tangga tersebut dikatakan rumah tangga miskin, seperti kondisi sosial, demografi, dan ekonomi penduduk.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut berupa data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2010, jumlah penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011, data kondisi sosial dan demografi penduduk di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Sedangkan data kualitatif adalah berupa regulasi pemerintah serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, dipergunakan sebagai pembanding.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan hasil publikasi instansi-instansi terkait khususnya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dalam berbagai bentuk laporan serta dalam beberapa terbitan. Selain itu digunakan pula data primer yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada penduduk miskin di desa-desa pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, wawancara, observasi, dan kuesioner. Kegiatan pengumpulan data ini melibatkan mahasiswa KKN Universitas Udayana Angkatan 2012 – 2013 yang saat itu sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata di desa – desa pesisir Nusa Penida. Setiap mahasiswa akan melakukan pendampingan pada keluarga – keluarga miskin di lokasi KKN, sehingga akan lebih mendalam untuk menerapkan metode wawancara dan observasi dalam penelitian ini.

Metode analisa yang dipergunakan adalah deskriptif, artinya jawaban masing – masing responden dikumpulkan untuk kemudian disusun dalam suatu tabel kuantitatif, untuk kemudian menjelaskan angka-angka yang terdapat pada tabel kuantitatif tersebut, dan dilakukan interpretasi terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisa deskriptif didukung pula oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini serta data-data yang diperoleh dari pencatatan dokumen instansi terkait.

Adapun metode penentuan responden dilakukan secara *Purposive Random Sampling* dimana menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Mengingat batasan penentuan jumlah keluarga miskin baik data resmi dari Biro Statistik Provinsi maupun Kabupaten tidak ada kesamaan. Demikian juga data tingkat kecamatan, dinas sosial dan dinas terkait dengan kemiskinan juga tidak ada kesesuaian. Data jumlah orang miskin di tingkat desa inipun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga penentuan jumlah responden dalam penelitian ini menyesuaikan kondisi dan kenyataan di lapangan dan juga petunjuk dari para kepala lingkungan di desa tersebut. Akhirnya di tetapkan dan terpilih 174 responden meliputi desa-desa di sepanjang pesisir Pantai Nusa Penida sebagai berikut:

Tabel 3.
Jumlah Responden Masing-Masing Desa
Lokasi Penelitian Rumah Tangga Miskin
Pesisir Pantai Nusa Penida

Nama Desa	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Suana	35	20,11
Batununggul	35	20,11
Ped	35	20,11
Sakti	34	19,56
Kutampi	35	20,11
Total	174	100

Sumber: data diolah, 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Nusa Penida yang identik dengan kegersangan dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam dan berbatu-batu, curah hujan rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisahkan oleh perairan/laut yang memberikan keterbatasan aksesibilitas dan keterisolasian dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Berikut data sebaran jumlah penduduk miskin per kecamatan di Kabupaten Klungkung.

Aspek Non Ekonomi

Aspek non ekonomi, dimana melihat profil kemiskinan penduduk di desa – desa pesisir Nusa Penida dari indikator demografi dan sosial penduduk. Adapun karakteristik responden bila dilihat dari segi umur, responden terbanyak pada usia 40-49 sebesar 24,71 persen, selanjutnya usia 30-39 tahun sebesar 24,14 persen. Ini berarti umur responden rumah tangga miskin dipesisir Nusa Penida berada pada usia-usia yang produktif. Sehingga besar kemungkinan untuk mengubah status mereka dan bukan sebagai rumah tangga miskin masih memungkinkan. Kondisi ini tergantung pada program dan kegiatan yang akan dilakukan agar kemiskinan semakin berkurang atau menurun. Sedangkan usia responden terendah berada di kisaran usia kurang produktif yaitu 70-79 tahun sebesar 6,90 persen. Demikian juga selanjutnya usia 80-89 tahun sebesar 9,47 persen. Tentunya kondisi ini tidak begitu bisa diharapkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Nusa Penida pada umumnya, khususnya di daerah pantai.

Lebih lanjut apabila dilihat dari segi jenis kelamin responden terlihat bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki yaitu 84,48 persen, sedangkan sisanya adalah perempuan sebesar 15,52 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa, sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan status sebagai kepala rumah tangga, sedangkan sisanya perempuan. Umunya mereka adalah terdiri dari para janda yang telah ditinggal suaminya meninggal. Status perkawinan responden dalam penelitian ini berstatus kawin sebesar 83,33 persen. Sisanya 2,87 persen belum menikah karena dari pengamatan selama di lapangan memang dijumpai beberapa yang belum menikah, karena usianya sudah lanjut.

Jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi suatu rumah tangga. Artinya pada rumah tangga dengan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak melakukan pengeluaran pendapatan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Kondisi ini pun dijumpai dalam penelitian tentang rumah tangga miskin di pesisir Nusa Penida. Umumnya rumah tangga yang memiliki tanggungan lebih banyak kondisinya lebih memperhatikan dibandingkan dengan rumah tangga dengan tanggungan yang lebih sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan responden rumah tangga miskin terbesar pada kelompok usia 15-64 tahun sebesar 60,99 persen. Umumnya mereka ini adalah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka biasanya ikut membantu mencari nafkah keluarga, namun pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk membantu pengeluaran keluarga sebagian dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan lain sehari-hari. Sedangkan kelompok usia 0-14 tahun sebesar 29,96 persen umumnya terdiri dari anak bayi dan anak-anak usia sekolah. Kelompok umur ini pun umunya sudah ikut membantu keluarga mencari atau melakukan pekerjaan keluarga. Namun penghasilan yang mereka peroleh umumnya akan dipergunakan sediri. Peneliti melihat kondisi ini terlihat anak-anak usia 10 tahun keatas sudah ikut bekerja dengan orang tuanya tau orang lain seperti menjemur rumput laut. Ini mereka lakukan sepulang dari sekolah atau pada saat hari-hari libur tertentu. Sedangkan kelompok umur ≥ 65 tahun termasuk anggota keluarga yang sudah tidak produktif lagi, tapi tenaganya masih bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk menjaga rumah, memasak, membuat persiapan upacara dan lain sebagainya.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat membawa pengaruh pada tingkat pendapatan keluarga dan secara tidak langsung akan membawa pengaruh pada kondisi rumah tangga tersebut. Umumnya tingkat pendidikan yang rendah membawa pengaruh pada pendapatan keluarga yang rendah pula, sehingga keluarga itu mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya dan sehingga membawa keluarga tersebut menjadi rumah tangga yang miskin. Demikian juga sebaliknya, karena akses untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar sulit diperoleh, dimana pendidikan mereka rendah. Dari data yang terkumpul, terlihat tingkat pendidikan yang baru diselesaikan oleh responden segian besar adalah sekolah dasar yakni sebesar 79,31 persen, menyusul SLTA 11,49 persen dan SLTA 5,17 persen. Sedangkan diploma atau perguruan tinggi sebesar 4,63 persen. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di desa-desa pesisir Nusa Penida. Dengan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi SLTP dan SLTA ini pun mereka harus pergi ke ibukota kecamatan. Tentunya ini memerlukan biaya yang sangat besar. Sedangkan untuk menyelesaikan pendidikan sekolah

dasar mereka juga memerlukan perjuangan yang sangat berat karena umumnya sekolah-sekolah ini terbatas hanya ada pada beberapa desa-desa tertentu saja. Sekolah dasar yang ada di desa saat ini di banjar sejak 50 tahun yang lalu disebut dengan Sekolah Dasar Inpres. Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mereka harus dan masih tetap sekolah ke kecamatan atau desa-desa yang dibayar sekolah-sekolah tersebut.

Kemudian mengenai jenis pekerjaan yang ditekuni oleh responden rumah tangga miskin di pesisir pantai Nusa Penida ditemukan bahwa sebagian responden mempunyai pekerjaan sebagai petani yakni sebesar 54,60 persen, menyusul buruh tani 20,12 persen. Sedangkan sebagai pedagang dan nelayan bervariasi kurang dari 10 persen. Kecuali lainnya sebesar 13,79 persen. Umumnya petani ini adalah petani di lahan kereng, karena di Nusa Penida tidak dijumpai adanya petani berlahan basah. Pekerjaan sebagai petani ini pun sebenarnya tidak bisa setiap saat dilakukan, melainkan pada musim-musim tertentu saja. Pada umumnya pada saat musim kemarau lahan yang dimiliki dibiarkan begitu saja tidak dialihkan karena tidak ada hujan. Sedangkan kalau musim penghujan baru diusahakan dan digarap seperti ditanami jagung, kacang-kacangan. Selebihnya mereka menanam tanaman jangka panjang seperti jambu mete, ketela dan lain sebagainya.

Lebih menarik lagi mengenai pekerjaan utama yang ditekuni oleh responden dalam penelitian ini adalah walaupun mereka berada di pesisir pantai namun sangat sedikit yang menekuni sebagai nelayan yaitu hanya 4,02 persen. Tapi mereka lebih banyak menekuni pekerjaan buruh tani yaitu 20,12 persen. Buruh tani disini adalah sebagai petani rumput laut. Untungnya mereka melakukan sistem bagi hasil atau kontrak kerja dalam mengusahakan rumput laut ini. Pekerjaan sebagai buruh tani disini adalah 20,12 persen. Sedangkan jenis pekerjaan lainnya adalah sebagai tukang bangunan, buruh bangunan dan membuat batako dari kapur gamping serta tukang ukir kayu.

Kondisi pekerjaan utama responden ini dipertegas lagi mengenai pekerjaan sampingan yang diambil. Dalam penelitian ini terlihat bahwa pekerjaan sebagai buruh tani (petani rumput laut) masih tetap didominasi yaitu sebesar 16,69 persen setelah pekerjaan lainnya seperti buruh bangunan, tukang ojek, dan lain sebagainya sebesar 19,54 persen. Selebihnya bervariasi kurang dari 10 persen sebagai petani, pedagang dan nelayan. Fenomena ini sangat menarik walaupun mereka tinggal di tepi pantai

pekerjaan sebagai nelayan tetap tidak begitu menarik diambil sebagai pekerjaan sampingan yakni hanya sebesar 2,87 persen. Mungkin mereka sepenuhnya mengalami dilemma pekerjaan sebagai nelayan mempunyai resiko yang sangat tinggi, lebih-lebih ombak disekitar pesisir Nusa Penida lebih banyak tidak bersahabat karena mempunyai gelombang yang sangat tinggi. Sehingga pekerjaan sebagai nelayan bukan lagi pekerjaan utama tapi hanya sampingan untuk mengisi waktu luang yang dimiliki dan lebih baik mengambil pekerjaan yang lain dan dianggap lebih bersahabat yaitu sebagai petani rumput laut. Lebih-lebih dalam beberapa dekade terakhir ini hasil produksi rumput laut cukup bagus dan hasilnya pun menggiurkan sehingga pekerjaan sebagai petani rumput laut dikatakan lebih menjanjikan. Hal ini tampaknya jelas lagi dimana masyarakat Nusa Penida yang berada di pegunungan banyak melakukan mobilitas kerja sebagai petani rumput laut. Umumnya mendirikan gubuk atau bedeng-bedeng di sepanjang pesisir pantai Nusa Penida.

Mengenai pekerjaan sampingan responden rumah tangga miskin pesisir Pantai Nusa Penida 2013, dijumpai suatu keadaan tidak semua responden mempunyai pekerjaan sampingan, hanya 52,87 persen yang mempunyai pekerjaan sampingan tersebut. Kondisi ini juga didukung oleh suatu kondisi usia kepala keluarga rumah tangga berada pada kelompok 50-89 tahun sebesar 40,81 persen. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kondisi kesehatan mereka sudah tidak lagi memungkinkan mereka untuk mengambil pekerjaan sampingan sebagai pekerjaan tambahan. Adapun tingkat pendapatan yang dimiliki oleh responden rumah tangga miskin berdasarkan penelitian didapat hasil bahwa tingkat pendapatan dari pekerjaan utama yang ditekuni oleh responden dalam hal ini sebanyak 69,82 persen memiliki penghasilan kurang dari Rp 500.000 sebulan. Masyarakat penghasilan Rp 500.000 - Rp 999.999 sebesar 23,56 persen. Sedangkan yang lebih besar dari Rp 2.500.000 sebanyak 2,87 persen. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Namun kondisi ini pun tidak dipungkiri terjadi karena 79,31 persen tingkat pendidikan responden yang hanya tamat sekolah dasar. Sehingga untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi jadi terbatas. Disamping itu peluang kerja dan berusaha di pedesaan juga sangat terbatas sekali, walaupun ada itu pun akan berhadapan dengan tingkat upah yang rendah. Akhirnya kondisi ini mendorong penghasilan mereka juga menjadi

sangat rendah. Namun walaupun demikian mereka masih bertahan dan memiliki kehidupan keluarga yang baik. Lebih lanjut apabila dilihat pendapatan yang diperoleh dari mengambil pekerjaan sampingan, pendapatan responden yang diperoleh dari pekerjaan sampingan juga hampir semua dimana 75,00 persen mereka memperoleh kurang dari Rp 500.000 per bulan. Kemudian 19,57 persen memperoleh penghasilan dari pekerjaan sampingan sebesar Rp 500.000 – Rp 999.999. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan dengan Rp 2.500.000 hanya 5,43 persen lebih dari itu tidak ada yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 2.500.000 perbulan.

Menurut Sayogyo (Arsyad,2004;240) menggunakan konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan untuk daerah pedesaan. Penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360kg per kapita per tahun. Secara lebih terperinci terlihat Sayogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.
Kategori Kemiskinan Menurut Sayogyo Di Pedesaan dan Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Beras (Dalam kg)

No	Kategori	Pedesaan	Perkotaan
1	Melarat	180	270
2	Sangat Miskin	240	360
3	Miskin	320	480

Sumber : Arsyad, 2004

Lebih lanjut garis melarat dihilangkan kemudian ditambah dengan nyaris miskin yaitu dengan 480 kg untuk daerah pedesaan dan 720 kg perkotaan. Apabila pendapatan dari pekerjaan utama responden dan pendapatan dari pekerjaan sampingan dijumlahkan dan dibagi dengan harga beras pada saat penelitian ini berlangsung maka dapat dikatakan bahwa responden rumah tangga miskin di pesisir pantai Nusa Penida dapat dikelompokkan sebagai rumah tangga nyaris miskin. Tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu bagaimana mereka bisa dikatakan hidup dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Berdasarkan pengamatan selama berada di lapangan, umumnya rumah tangga miskin di Pesisir Pantai Nusa Penida mempunyai siasat menyikapi kondisi ini yaitu tergantung pada cuaca atau musim. Apabila musim kemarau berlangsung para penduduk umumnya akan makan nasi tanpa dicampur dengan

pangan lain seperti jagung atau ketela. Sedangkan pada saat musim penghujan mereka memasak nasi yang bercampur dengan pangan lain seperti jagung atau ketela. Kondisi ini tentunya berlangsung secara turun temurun dalam kurun waktu yang lama, Sehingga kekurangan penghasilan bagi mereka bukanlah hambatan untuk bertahan hidup.

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk menentukan besaran tingkat pendapatan yang akan diperoleh, karena merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. D i l i h a t dari tingkat pendidikan, dimana pendidikan seseorang akan berdampak pada kualitas pekerjaan itu sendiri dan proses produksi yang dikerjakannya, Menurut Todaro (2000) alasan pokok mengenai pengaruh pendidikan formal terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi yang positif antara pendidikan dengan penghasilan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Jika seseorang dapat menyelesaikan pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi akan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan yang lebih rendah. Kondisi ini tampak jelas pada tingkat pendidikan anggota keluarga responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida, baik yang sudah maupun belum bekerja. Berdasarkan penelitian didapat hasil bahwa tingkat pendidikan yang bisa diselesaikan anggota keluarga responden rumah tangga miskin pantai pesisir Nusa Penida hanya tamat sekolah dasar hanya 43,97 persen. SLTP hanya 15,73 persen dan SLTA hanya 10,34 persen, sedangkan diploma atau perguruan tinggi hanya sebesar 2,80 persen. Namun yang tidak tamat sekolah dasar masih sangat tinggi yaitu 27,16 persen. Kelompok inilah umumnya yang akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang memadai. Sehingga ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi responden selaku kepala keluarga.

Sedangkan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA umumnya sudah bekerja tapi mereka tidak tinggal di desanya lagi, karena sebagian dari mereka bekerja ke Denpasar atau Kota-Kota lainnya di Bali. Adapun pekerjaan yang ditekuni umumnya sebagai karyawan toko, pedagang, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Namun kelompok ini juga tidak sepenuhnya bisa memadai melainkan kadang-kadang masih membebani responden apabila suatu saat penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Terkecuali anggota keluarga yang bisa menyelesaikan diploma atau

perguruan tinggi karena umunya mereka ini bekerja pada sektor-sektor yang lebih formal seperti hotel, restoran, pegawai kantor, dan lain sebagainya.

Sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kondisi ini sudah diusahakan seperti membuka pelatihan kerja, kursus, tentang peluang kerja dan usaha yang bisa ditekuni oleh anggota keluarga responden baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja. Pelatihan-pelatihan yang sudah pernah dilakukan adalah kursus perbengkelan, sepeda motor, pelatihan bar dan restoran, menjahit dan bahasa asing. Namun setelah selesai mengikuti kursus dan pelatihan tersebut, ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan tapi ada pula yang gagal. Mengenai anggota keluarga responden yang telah pernah mendapat pelatihan kerja didapatkan hasil bahwa, sebagian besar anggota keluarga responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida 88,51 persen telah memperoleh pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah baik yang berlangsung di kecamatan atau di luar Nusa Penida. Hanya 11,49 persen yang tidak memperoleh atau mengikuti pelatihan kerja tersebut. Tentunya dari jumlah anggota keluarga yang mendapat pelatihan ini tidak sepenuhnya juga dalam pasaran kerja. Ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan namun ada yang juga yang tidak berhasil.

Aspek Ekonomi

Curahan jam kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan. Adapun curahan waktu kerja sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Ada jenis pekerjaan yang memerlukan curahan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Namun sebaliknya ada jua jenis pekerjaan yang memerlukan curahan kerja pendek serta terbatas. Apapun jenis pekerjaannya jelas akan membawa pengaruh pada tingkat pendapatan yang diperoleh. Umumnya memakan waktu lama dan panjang curahan waktu kerja yang dilakukan maka akan memberikan pendapatan yang lebih besar pula.

Dilihat dari alokasi waktu atau curahan waktu kerja responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan, ditemukan hasil bahwa curahan waktu kerja responden untuk pekerja utama dalam seminggu rata-rata 7 hari kerja, sedangkan pekerjaan sampingan adalah 6 hari kerja. Sedangkan curahan jam kerja untuk pekerjaan utama 8 jam sehari lebih panjang dari curahan jam kerja untuk waktu pekerjaan sampingan hanya 2,5 jam. Dengan demikian

responden lebih mementingkan pekerjaan utama dibandingkan dengan sampingan. Disamping itu pekerjaan sampingan akan diambil atau dilakukan apabila pekerjaan utama selesai dikerjakan apabila pekerjaan utama diselesaikan dikerjakan dan masih ada waktu untuk mengambil pekerjaan sampingan. Kondisi ini dalam penelitian dilakukan oleh mereka yang mengambil pekerjaan sebagai buruh tani, mereka akan melakukan penjemuran rumput laut yang baru dipetik atau setengah kering. Setelah itu ditinggal untuk melanjutkan pekerjaan lain. Ini dilakukan apabila cuaca baik. Namun apabila musim hujan umumnya memerlukan waktu yang lebih banyak. Demikian juga apabila matahari sudah terbenam rumput laut yang tadi sudah dijemur dikumpulkan kembali, dengan harapan besok pagi akan dijemur lagi sampai kering. Pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang sampai rumput laut itu kering dan siap untuk dijual.

Namun dalam kondisi pada hari-hari tertentu responden rumah tangga miskin tidak bisa melakukan pekerjaan mereka baik yang utama maupun sampingan. Adapun keputusan untuk tidak bekerja karena ada kesibukan untuk mengerjakan pekerjaan lain terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan adat istiadat, hari raya purnama, tilem, kajeng kliwon, ada odalan atau kematian, tetangga punya hajatan dan lain sebagainya. Adapun keputusan untuk tidak bekerja responden berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa keputusan untuk tidak bekerja pada hari-hari tertentu responden 82,18 persen mengatakan ya, hanya 17,82 persen menyatakan tidak. Kondisi ini memang membuat responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida ini terikat pada masalah adat. Jadi kalau di desanya berlangsung suatu kegiatan adat dan keagamaan, maka secara otomatis mereka tidak bekerja karena harus mengikuti kegiatan tersebut. Seperti odalan di Pura Khayangan Tiga, Pura Dadya, Pura Pemaksan, ada anggota masyarakat meninggal atau mempunyai hajatan tertentu.

Jumlah tanggungan akan membawa pengaruh pada kondisi rumah tangga responden karena akan membawa pengaruh pada pendapatan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya sehari-hari. Adapun jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan responden, karena belum bekerja didapat hasil bahwa sebagian besar responden rumah tangga miskin mempunyai tanggungan 2-5 orang sebesar 98,28 persen. Sedangkan yang mempunyai tanggungan lebih dari lima orang hanya

sebesar 1,72 persen. Melihat kondisi ini tentunya rumah tangga responden hampir semuanya mempunyai beban tanggungan anggota keluarga yang belum bekerja. Sedangkan jumlah anggota keluarga yang sudah bekerja dan masih menjadi tanggungan responden berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa, hampir sebagian besar responden 90,23 persen masih mempunyai tanggungan anggota keluarga walaupun mereka sudah bekerja. Responden lain yang masih mempunyai tanggungan anggota keluarga berusia 0 sampai 14 tahun dan lebih besar sama dengan 65 tahun kisarannya kurang dari 10,05 persen. Melihat kondisi responden rumah tangga pesisir Nusa Penida mempunyai beban yang sangat besar. Keadaan ini memang tidak bisa dihindari lagi karena hampir 43,97 persen anggota keluarga hanya tamat sekolah dasar. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sangat sulit sekali. Walaupun demikian bukan berarti anggota keluarga yang belum bekerja dan masih menjadi tanggungan responden sama sekali tidak bekerja. Umumnya mereka bekerja jika ada kesempatan. Namun dalam bekerja ini mereka melakukan curahan waktu kerja yang relatif lebih pendek, didapat hasil penelitian bahwa anggota keluarga yang menjadi tanggungan responden sudah berusaha bekerja namun curahan alokasi waktu kerja mereka relatif pendek yaitu 35 jam per minggu. Sebagian dari mereka ada yang bekerja lebih dari 35 jam sebesar 58,05 persen. Sedangkan yang kurang dari 36 hanya 40,96 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa lapangan kerja yang ada di desa relative terbatas. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan selama penelitian ditemukan hal-hal tersebut. Umumnya mereka bekerja paruh waktu menggantikan pekerja lain karena sesuatu hal, seperti sakit, ada kegiatan adat dan keagamaan. Lebih lanjut apabila dilihat dari pekerjaan yang telah ditekuni mereka yang masih menjadi beban tanggungan responden selama mereka mendapat pekerjaan, jenis pekerjaan utama yang ditekuni oleh anggota keluarga dan masih menjadi tanggungan responden adalah sebagai buruh tani sebesar 37,93 persen. Sedangkan petani 34,48 persen, menyusul sebagai pedagang sebesar 18,39 persen. Selanjutnya sebagai nelayan dan lainnya masing-masing kurang dari 10 persen. Fenomena yang paling menarik dan perlu menjadi pemikiran dan pertimbangan adalah pekerjaan sebagai nelayan, tetap bukan menjadi pilihan bagi mereka. Walaupun belum memiliki pekerjaan tetap meskipun ada yang menekuni hanya sebesar 3,45 persen.

Untuk rata-rata penghasilan anggota keluarga yang bekerja dan masih menjadi tanggungan keluarga per bulan didapat hasil bahwa sebagian beban anggota keluarga yang menjadi beban tanggung jawab responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida 78,16 persen memiliki penghasilan kurang dari Rp 500.000. Disusul kemudian 17,82 persen juga memperoleh penghasilan Rp 500.000 sampai dengan Rp 999.999. Sedangkan Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000 sebesar 4,02 persen. Lebih lanjut penghasilan yang diperoleh oleh anggota keluarga yang bekerja namun masih menjadi tanggungan responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida, ternyata sebagian besar 58,62 persen menyerahkan sepenuhnya penghasilan mereka kepada responden. Kemudian menyusul yang hanya menyerahkan 25 persen penghasilannya sebagian kontribusi kepada penghasilan responden sebesar 12,70 persen. Sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang menyerahkan 25 sampai 50 persen penghasilannya untuk responden sebesar 25,9 persen. Fenomena ini terlihat pada saat penelitian ini berlangsung responden mendapatkan kiriman uang dari anggota keluarga yang secara kebetulan bekerja di Luar Nusa Penida. Umumnya uang ini dititipkan kepada teman, sahabat yang kebetulan pulang ke Nusa Penida karena sesuatu hal. Yang menyerahkan sepenuhnya 100 persen adalah mereka yang masih bekerja di desanya.

Dalam penelitian pengeluaran keluarga yang diperhitungkan adalah pengeluaran untuk membeli kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan dan papan. Perhitungan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dengan menghitung keseluruhan konsumsi keluarga. Adapun besarnya pengeluaran responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida terbesar yaitu 46,55 persen sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.500.00 per bulannya. Menyusul kisaran pengeluaran Rp 500.000 sampai dengan Rp 999.999 sebesar 42,53 persen. Sedangkan yang kurang dari Rp 500.000 hanya sebesar 9,77 persen. Melihat kondisi ini sudah dipastikan bahwa seluruh penghasilan yang dihasilkan responden semuanya akan habis dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengalami kekurangan-kekurangan dan umumnya mereka atasi dengan membeli kebutuhan secara berhutang. Hutang ini akan dibayar apabila keuangan keluarga sudah memungkinkan untuk itu. Atau pada saat ada kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar Nusa Penida. Lebih lanjut

tingkat pengeluaran responden terlihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Pengeluaran Responden Rumah Tangga Miskin Pesisir Pantai Nusa Penida 2013

Pengeluaran (Rp/Bulan)	Responden (Orang)	Persentase (%)
≤ 500.000	17	9,77
500.000 – 999.999	74	42,53
1.000.000 – 2.500.000	81	46,55
≥ 2.500.000	2	1,15
Jumlah	174	100

Sumber: data diolah, 2013

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pendekatan berbasis hak relevan dengan perkembangan sosial politik dan ekonomi yang terjadi. Proses demokrasi yang berlangsung selama ini telah merubah kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang pembangunan. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Kemiskinan merupakan isu sentral yang membawa setiap pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan secara nyata, menyentuh langsung kepada masyarakat, konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dirasakan sangat penting karena kemiskinan akan tetap pada lingkarannya apabila tidak ada upaya riil yang dilakukan. Walaupun tidak dipungkiri setiap kebijakan tidak memungkinkan meniadakan orang miskin. Dalam menganggulangi jumlah keluarga miskin tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Sekaligus dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Subsidi Langsung Tunai (SLT), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUSKERA), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM/P2KP), dan Program Community Based development (CBD), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan yang terakhir adalah bantuan subsidi masyarakat (BLSM).

Adapun bantuan dari pemerintah yang langsung dan pernah diterima oleh responden rumah tangga miskin pesisir pantai Nusa Penida didapat hasil bahwa responden rumah tangga miskin yang pernah mendapat bantuan dari pemerintah dengan frekuensi bantuan dua sampai empat kali 54,07 persen, kurang dari dua kali sebesar 41,95 persen. Sedangkan yang menerima bantuan lebih dari empat kali sebesar 4,03 persen. Namun ketika ditanyakan jenis bantuan yang diterima mereka mengatakan sudah lupa. Sebagian besar mengatakan berupa uang tunai dengan besarn Rp 300.000 setiap bulannya akan tetapi sampai saat ini sudah berhenti. Adapun bantuan yang masih diterima adalah bantuan beras miskin (Raskin), dengan mengganti atau membayar sebesar Rp 1500 untuk satu kilogram beras. Namun mereka mengatakan kualitas berasnya sangat jelek sekali. Responden tetap harus mengambil beras tersebut karena pembagiannya sudah dijatah oleh pemerintah. Setiap kepala keluarga miskin mendapatkan sepuluh sampai dua puluh kilogram beras setiap bulannya. Penerimaan beras ini sering tidak tepat waktu, tergantung datangnya pasokan dari Bali daratan.

Sedangkan untuk bantuan yang lainnya seperti modal usaha, hampir semua responden mengatakan belum pernah menerima. Bahkan semua responden mengatakan pernah mendengar rencana pemerintah tersebut, akan tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan tidak pernah terwujud. Bantuan lain berupa ternak mereka sudah menerima namun diberikan atas nama kelompok dan dikelola secara bersama-sama baik itu berupa sapi, babi, ayam dan lain sebagainya. Adapun program ini mereka mengatakan dengan sebutan Program Simantri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dilihat dari aspek non ekonomi yaitu indikator demografi penduduk: (a) umur, bahwa penduduk miskin terbanyak pada kelompok umur 40 – 49 tahun yaitu sebesar 24,71 persen, sedangkan terendah yaitu sebesar 6,90 persen pada kelompok umur 70 – 79 tahun. (b) jenis kelamin, bahwa penduduk miskin terbesar pada penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 84,48 persen dan sisanya berjenis kelamin perempuan. (c) status perkawinan, bahwa sebesar 83,33 persen penduduk miskin berstatus kawin; 8,65 persen berstatus duda, dan sisanya 5,75 persen berstatus janda. (d) tingkat pendidikan, bahwa

penduduk miskin sebesar 79,31 persen hanya sampai tingkat pendidikan sekolah dasar, sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi sebesar 10 persen. (2) Dilihat dari aspek ekonomi yaitu indikator curahan waktu kerja dan tingkatan pendapatan: (a) jumlah tanggungan keluarga, bahwa sebesar 60,99 persen penduduk miskin memiliki tanggungan pada kelompok umur 15 – 64 tahun, pada kelompok umur 0 – 14 tahun sebesar 29,96 persen. (b) jenis pekerjaan, bahwa pekerjaan utama penduduk miskin adalah sebagai petani yaitu sebesar 54,60 persen, sebagai buruh tani sebesar 20,12 persen, sebagai nelayan sebesar 4,02 persen. (c) pekerjaan sampingan, bahwa sebesar 19,54 persen penduduk miskin memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan tukang. (d) tingkat pendapatan, bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan utama sebesar 67,82 persen memperoleh pendapatan kurang dari Rp. 500.000/bulan sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan sebesar 75,00 persen memperoleh pendapatan kurang dari Rp. 500.000/bulan. (e) alokasi waktu curahan waktu kerja untuk pekerjaan utama dalam seminggu 7 hari kerja dan dalam sebulan 28,5 hari dengan curahan waktu sehari 8 jam kerja. Sedangkan untuk pekerjaan sampingan dalam seminggu, penduduk hanya bekerja 6 hari kerja dan dalam sebulan 26,5 hari kerja dengan curahan waktu kerja 2,5 jam per hari kerja. Dalam mengambil pekerjaan utama maupun sampingan semua penduduk sebesar 82,18 persen tidak lagi melakukan pekerjaan pada hari-hari tertentu karena ada kegiatan adat atau agama disamping karena sakit. Hampir semua penduduk mempunyai beban tanggungan anggota keluarga 98,28 persen dengan besaran tanggungan 2 sampai 5 orang sisanya memiliki jumlah tanggungan lebih dari 5 orang. Adapun anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan dan sudah bekerja memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga sebesar 58,62 persen memberikan 100 persen penghasilannya, karena mereka masih tetap bekerja di Nusa Penida, sedangkan yang keluar dari Nusa Penida kontribusi sebesar 25,29 persen menyisihkan penghasilannya kepada responden penelitian. (f) Adapun besaran pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebesar 46,55 persen untuk Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000. Mengenai masalah bantuan dari pemerintah sebanyak 2 sampai 4 kali sebesar 54,02 persen berupa uang tunai. (g) Luas pekarangan rumah rata-rata 100 – 200m² sebesar 45 – 40 persen, dengan luas bangunan \geq 36m² sebesar 49,43 persen sedangkan dinding rumah 85,06

persen permanen demikian juga lantai bangunan 83,91 persen permanen seperti semen atau keramik dengan penerangan rumah 83,91 persen menggunakan listrik. Sedangkan kebutuhan air minum keluarga 81,61 persen adalah berasal dari PDAM, hanya 18,39 persen menggunakan sumur/tadah hujan. Sebanyak 62,64 persen responden tidak memiliki WC dan hanya 37,36 persen memanfaatkan WC.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang diperoleh maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) Sebagian besar penduduk miskin di Nusa Penida berada dalam kelompok usia produktif sehingga kelompok ini perlu dijadikan focus program pengentasan kemiskinan. (2) Pemda Klungkung disarankan memperbesar alokasi dana pendidikan baik berupa fasilitas pendidikan maupun *transfer of knowledge*. (3) Upaya menstimulus peningkatan pendapatan penduduk miskin di desa Nusa Penida perlu dilakukan dengan mengembangkan potensi lokal yang ada.

REFERENSI

- Arsyad Lincolin. 2004. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: PT. BPFY Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Jakarta
- Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Bali 2007*. Bali
- Bank Indonesia dengan Komite Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 2007. *Model Pertumbuhan Ekonomi Regional Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2007*. Bali
- Biro Pusat Statistik. 2010. *Statistik Indonesia*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2011. *Data Membangun Bali*. Bali
- Indra Gunawan Putra, 2011. Pengaruh Umur, Jam Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Tanggungan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. *Skripsi Program S1 UNUD*
- Karmila Dewi, Ni Made. 2011. Efektivitas dan Dampak Usaha Ekonomi Produktif Community Based Development (CBD) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Kepala Keluarga Miskin di

- Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Skripsi* Program S1 UNUD
- Kuta. 2004. Efektifitas Program Kelompok Belajar Usaha Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *Tesis* Magister Ekonomi Pembangunan pada Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar
- Lison. 2003. Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Badung. *Tesis* Magister Ekonomi Pembangunan pada Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar
- Prihartini, Diah Aryati. 2006. *Perbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan Peran Strategis dari Usaha Mikro untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok
- Tadjuddin, Noer Effendi. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Cetakan 11. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Todaro. Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga
- Zadjuli, Imam Suroso. 1999. *Penanggulangan Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Universitas Airlangga